

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada bab ini penulis memberikan beberapa kesimpulan dari hasil yang dilakukan oleh peneliti adalah bahwasanya terjadinya Penurunan Partisipasi Politik Di Pemilihan Kepala Daerah Pada Walikota Dan Wakil Walikota Padang Putaran Kedua di seluruh kecamatan yang ada di Kota Padang, yang cenderung menurun itu di kecamatan Bungus Teluk Kabung. Partisipasi Politik aktif sangat jelas penurunan suaranya pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Padang Di Putaran Pertama pada Tahun 2013 di bandingkan dengan putaran kedua pada Tahun 2014 kemaren. Partisipasi Politik Pemberian suara dalam kegiatan Pemilihan Umum merupakan bentuk Partisipasi Politik aktif yang seringkali dilakukan oleh Masyarakat di Daerah dibandingkan dengan Partisipasi Politik lain.

Dari penjelasan yang didapat peneliti di lapangan yang menjadi penyebab Penurunan Partisipasi Politik Masyarakat Kota Padang Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Padang Pada Tahun 2014 Kemaren Dapat Di Jelaskan Dari Berbagai Faktor Yang Dikemukakan Oleh Hari Soegiman di bawah ini

1. Karena alasan meninggal dunia.
2. Karena sakit

3. Karena melakukan tindakan tertentu yang dapat mengakibatkan seseorang kehilangan hak pilihnya.
4. Alasan kemanusiaan dan dalam perjalanan.
5. Pindah alamat tanpa disertai administrasi yang jelas.
6. Ikut mencoblos tetapi salah tusuk.
7. Sengaja tidak ikut mencoblos dengan alasan yang tidak jelas

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa ada beberapa alasan yang dikemukakan oleh Hari Soegima di atas hanya ada tiga alasan yang bisa ditemukan oleh peneliti di lapangan yaitu: karena sakit, alasan kemanusiaan sedang dalam perjalanan, sengaja tidak ikut mencoblos.

B. Saran

Dengan adanya penelitian ini, peneliti berharap Prilaku Pemilih Masyarakat dalam kegiatan pemilihan yang berupa memberikan sikap tidak ikut serta dalam Pemilihan Kepala Daerah ataupun Golput merupakan fenomena yang sedang terjadi dalam pemilu dan pilkada di beberapa Daerah di daerah saat ini khususnya di Kecamatan Bungus Teluk Kabung. Untuk itu menghindari fenomena ini agar tidak terjadi lagi di masa yang akan datang. Oleh karena itu dalam proses menyelesaikan penelitian ini ada beberapa saran yang akan menjadi harapan penulis di masa depan yaitu :

Dengan adanya penelitian ini peneliti berharap Dalam situasi yang seperti inilah peran Partai Politik sangat diharapkan untuk meredam konflik yang terjadi di masyarakat. Partai politik bertanggung jawab atas calon yang di dukunginya

dalam artian sebagai penengah. Tidak dipungkiri bahwa ketidakrelaan calon yang kalah dalam pertarungan pemilu karena disebabkan biaya yang mahal pada masa kampanye.

Sebaiknya Partai Politik dalam menentukan calon peserta pemilihan umum yang akan didukung jangan hanya berorientasi pada uang saja, tetapi melihat kemampuan dan potensi yang dimiliki, misalnya dengan memanfaatkan kader Partai sebagai calon yang diusung karena sudah mengetahui kemampuan dan track record kader partainya sehingga tidak perlu ada istilah “balas budi”.

Dengan demikian apabila proses seleksi calon dilakukan dengan baik dan benar maka dunia Politik Indonesia akan bersih dan bebas korupsi. Selain itu, hal tersebut juga akan membuat partai lebih sehat dalam artian proses pengkaderan dan pergerakan organisasi akan lebih baik karena diisi oleh kader yang benar-benar mencintai partai dan sudah lama mengetahui permasalahan dan budaya dalam partai tersebut.

Selain itu, dalam meningkatkan Partisipasi Masyarakat pada pemilu bukan semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi ada tiga komponen yang terkait yaitu pemerintah atau penyelenggara pemilihan Kepala Daerah, partai Politik dan masyarakat. Masyarakat juga hendaknya dijadikan objek dalam pemilu tetapi diberikan peran yang cukup besar sehingga ada rasa memiliki terhadap pemilihan kepala daerah, merasa ikut bertanggung jawab dalam pemilihan pemimpin daerahnya sehingga secara nyata ikut berpartisipasi penuh dalam Pemilihan Kepala daerahnya. Salah satu yang dapat memberikan pemahaman dan

kesadaran pentingnya Pemilihan Kepala daerahnya adalah memberikan motivasi dengan sosialisasi, pendidikan politik masyarakat agar ada kemauan dan memiliki kemampuan serta pada masyarakat diberikan kesempatan untuk berpartisipasi yang sebesar-besarnya.

Sebaiknya pihak-pihak yang terkait dengan proses Demokratisasi seperti KPUD, PPK, PPS, LSM, Pemerintah Daerah, tim sukses dan Partai Politik supaya lebih giat lagi untuk memberikan Pendidikan Politik atau pelajaran tentang Politik Kepada Masyarakat, sehingga Partisipasi Masyarakat dalam setiap kegiatan Politik akan lebih meningkat.

Setiap calon yang akan berkompetisi dalam pemilihan Kepala Daerah harus lebih kompeten dan juga menawarkan program-program yang kongkret bukan hanya sekedar janji-janji karena masyarakat menginginkan bukti bukan hanya janji belaka, walau pasangan calon dapat menarik simpati dari masyarakat dengan visi misinya akan menjadi daya tarik sendiri untuk mempengaruhi Partisipasi Politik Masyarakat.

